

## **. BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian penulis menggunakan kajian pustaka. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk menemukan sisi menarik atau hal lain dari tesis yang akan penulis teliti tujuan kajian pustaka ini juga akan menjadi instrument pembanding dalam melakukan penelitian tentang Perpecahan dan soliditas elite Partai Golkar pada pemenangan pilkada serentak 2015 di Kota Ternate, adapun kajian pustakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Lesmana. A. (2015). Menjelaskan bahwa pertikaian dalam partai tersebut adalah pertikaian sesama elite partai yaitu antara Pimpinan (DPD) I Golongan Karya di Provinsi Lampung Dengan Kepemimpinan Daerah tingkat Kabupaten Kota (DPD) II Partai Golongan Karya Kota Bandar Lampung oleh Heru Sambodo Sebagai Pemimpin, pertikaian ini sebenarnya hanya sebua kepentingan personal /pribadi sehingga konflik ini merembet dan semua elite partai terlibat dalam pertikain sehingga melahirkan

faksi-faksi dalam struktur partai politik di tingkat lokal, jika dicermati konflik yang terjadi sebenarnya tidak begitu serius dan bisah diselesaikn melalui mekanisme atau diselesaikn secara personal maka konflik tidak berdampak pada kelembagaan partai politik.

Astriya. D. (2014). Bahwa faktor penyebab konflik adalah pemberhentian Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Abdurachman Sarbini adalah pertama, adanya rasa ketidakpercayaan Partai Amanat Nasional pada kepemimpinan yang banyak dilanggar, kinerja yang diperuntukan untuk Partai Amanat Nasional yang tidak mampu dijalankan dengan baik dan janji politik yang tidak ditepati. Kedua, adanya faktor ketidakpengertian yang dilakukan Abdurachman Sarbini sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Ketiga, adanya kepentingan yang dilakukan Abdurachman Sarbini dimana Partai Amanat Nasional digunakan untuk mendulang suara anaknya di partai yang berbeda dengannya. Keempat, komunikasi yang buruk yang terjalin di dalam Partai Amanat Nasional. Kelima, adanya identitas yang terancam. Sedangkan bentuk konflik yang

terjadi dikategorikan pada bentuk konflik manifest (terbuka) yang berakar dalam dan nyata sehingga perlu adanya penyelesaian untuk mengatasi akar penyebab dan efeknya.

Eristyawan. F. N. (2013). Dalam penelitian ini membahas tentang kaitan antara pelebagaan partai politik dengan kemerosotan suara yang dialami oleh PKB pada pemilihan umum tahun 2009 khususnya di Jawa Timur. Dalam penelitian menjelaskan bahwa lemahnya pelebagaan partai dalam tubuh PKB adalah faktor utama yang menjadi penyebab kemerosotan suara yang dialami PKB dalam pemilihan umum tahun 2009 terutama di Jawa Timur. Lemahnya pelebagaan PKB terlihat dari adanya fraksi-fraksi yang terjadi antar fraksi di internal PKB yang menunjukkan lemahnya dimensi kesisteman dalam tubuh PKB sehingga berpengaruh terhadap elektabilitas partai politik dan berdampak pada kemerosotan suara pada pada pemilu tahun 2009 di provinsi jawa timur.

Faisol. A. Bahwa keberadaan oligarki politik berdampak pada proses konflik internal yang berakibat pada perpecahan

menjadi partai baru yang berdampak pada kemerosotan suara hasil pemilu.

Sari. E. Arsyad. A. & Kambo. G. A. 2013. motif di balik konflik tiga elit di Pemilihan Umum Walikota Makassar adalah upaya mempertahankan kekuasaan dan oliarki kekuasaan.

Asmadianto. A. & Nurmandi. A. (2016). Pemicu terjadinya konflik dan perpecahan dalam tubuh Partai Golkar Sulawesi Barat ada beberapa penyebab yang menjadi persoalan yang paling mendasar yang pertama, adalah Pemecatan ketua DPD I Sulbar yang di lakukan oleh DPP langka mendapatkan aksi protes sejumlah kader di daerah, kedua pengangkatan Nurdin Halid sebagai pejabat sementara ketua DPD I semakin memperanas embrio konflik di internal partai, ketiga proses pemecatan yang dilakukan oleh DPP sebagian pengurus DPD I ikut menyoroti dan memperanas konflik, jika dilihat masalah konflik dalam tubuh Partai Golkar akan berdampak pada elektabilitas pasangan calon yang di usung oleh Partai Golkar dalam suksesi pilkada sulbar 2014.

Waracma. T. (2014). Dalam pemilihan walikota makasar 2013, terjadinya pertikain atau konflik internal Partai Golkar, konflik ini adalah sebuah kepentingan politik Syahrul YL dan Nurdin Halid, yang sama-sama menjadi tokoh sentral dalam partai golkar di Sulawesi selatan sehingga dalam proses suksesi pemilihan walikota makasar Syahrul YL dan Nurdin Halid membuat Partai Golkar harus terpecah menjadi dua faksi untuk memenangkan pasangan calon yang di jagokan Syahrul YL dan Nurdin Halid.

Misrina. M. (2015). Menyatakan faksi yang terjadi di internal Partai Golkar disebabkan oleh dua hal, yaitu pragmatis elit Partai Golkar dan hubungan patron-klien antar-elite yang menyebabkan konflik semakin menguat. Karakteristik faksi Partai Golkar dilihat dari fragmentasi faksi terpecah mejadi dua kubu (bipolar) yaitu kubu pro Thaib dan kubu pro Gafur.

Kaunar. A. (2011). Dalam penelitian ini memang terjadi dualisme dalam proses kebijakan antara DPD II dan DPP sehingga partai yang berlambang pohon beringin ini kembali diguyur konflik dalam suksesi pemilihan walikota Ternate

periode 2010-2015, dibalik dari dualisme kebijakan terdapat ada unsur kepentingan politik elite yang didaerah, Iqbal Ruray yang merupakan kader Partai Golkar Ternate dan juga Ketua Umum Partai Golkar DPD II Kota Ternate, telah ditetapkan sebagai calon walikota Partai Golkar. Tapi akhirnya Hi. Burhan Abdurrahman yang bukan kader Partai Golkar saat ini (non-kader) secara resmi ditetapkan sebagai calon walikota oleh DPP, perubahan kebijakan ini yang menjadi pemincu konflik internal Partai Golkar dalam suksesi pilwako Ternate periode 2010-2015.

Effendi. A.T. (2015). Dalam konflik ini bawasanya fenomena yang terjadi di internal secepat mungkin diselesaikan dengan mengikuti saran petinggi atau penasehat partai, untuk DPD I Partai Golkar Kota Surabaya, maneuver yang dilakukan oleh pengurus DPD dapat di selesaikan di tingkat DPD dengan melihat alur perkembangan dari DPP Partai Golkar, sehingga konflik yang terjadi dalam tubu DPD Partai Golkar Kota Surabaya tidak berdampak pada elektabilitas Partai Golkar dalam kontestasi pemilihan kepalah daerah.

Tabel 2.I Tinjauan Pustaka

NO	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
	Asmadianto. Nurmandi. A. (2016).	Konflik Internal Dan Rekrutmen Politik Partai Golkar Sulawesi Barat 2014).	Pemicu terjadinya konflik dan perpecahan dalam tubuh partai golkar Sulawesi barat ada beberapa penyebab yang menjadi persoalan yang paling mendasar yang pertama, adalah Pemecatan ketua DPD I Sulbar yang di lakukan oleh DPP langka mendapatkan aksi protes sejumlah kader di daerah, kedua pengangkatan Nurdin Halid sebagai pejabat sementara ketua DPD I semakin memperanas situasi dalam internal, , jika di lihat masalah konflik dalam tubuh partai golkar akan berdampak pada elektabilitas pasangan calon yang di usung oleh partai golkar dalam suksesi pilkada sulbar 2014.
	Waracmah. T. (2014).	Konflik Internal Partai Golkar Pada Pemilihan Walikota Makasar Tahun 2013.	Dalam pemilihan walikota makasar 2013, terjadinya pertikain atau konflik internal partai golkar, konflik ini adalah sebuah kepentingan politik Syahrul YL dan Nurdin Halid, yang sama-sama menjadi tokoh sentral dalam partai golkar di Sulawesi selatan sehingga dalam proses suksesi pemilihan walikota makasar Syahrul YL dan Nurdin Halid membuat partai golkar harus terpecah menjadi dua faksi untuk memenangkan pasangan calon yang di jagokan Syahrul YL dan Nurdin Halid.

	Misrina. M. (2015).	Metamorfosis Faksionalisme Internal Partai Golkar di Maluku Utara pada PILKADA 2007.	Yang menjadi faktor utama Konflik dan perpecahan elite partai golkar adalah persoalan pragmatisme yang mendominasi sehingga melahirkan faksi antara elite partai di mana terdapat faksi yang pro taib armain dan faksi yang pro abdul gafur sehingga dalam suksesi pilkada Maluku Utara harus berujung perpecahan elite dalam partai golkar.
	Kaunar. A. (2011).	Pusaran Politik Dalam Rekrutmen Kandidat Partai Golkar (Studi Tentang Rekrutmen Kandidat Oleh Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Periode 2010-2015) .	Dibalik dari dualisme kebijakan terdapat ada unsur kepentingan politik elite yang didaerah, Iqbal Ruray yang merupakan kader Partai Golkar Ternate dan juga Ketua Umum Partai Golkar DPD II Kota Ternate, telah ditetapkan sebagai calon walikota Partai Golkar. Tapi akhirnya Hi. Burhan Abdurrahman yang bukan kader Partai Golkar saat ini (non-kader) secara resmi ditetapkan sebagai calon walikota oleh DPP.
	Effendi. A. T. (2015).	Dampak Konflik DPP Partai Golkar Terhadap DPD Partai Golkar Kota Surabaya	Konflik internal DPP partai golkar berdampak ke struktur partai golkar DPD partai golkar kota Surabaya, yang pertama pergantian ketua DPD partai golkar Surabaya Adies Kadier dan di angkat Muhammad Alyas, kedua sikap politik yang di ambil DPD partai golkar kota Surabaya dalam menghadapi konflik internal yang terjadi dengan cenderung untuk mengikuti kubu partai golkar dengan kepemimpinan abruzal bakrie

			yang di anggap sah, dengan sikap yang di ambil oleh DPD golkar kota Surabaya telah melahirkan perpecahan akibat konflik tersebut dengan adanya dua kubu yang mengikuti masing-masing kepemimpinan DPP partai Golkar.
	Lesmana. A. (2015).	Impilkasi konflik internal partai golkar terhadap (DPD) provinsi lampung	Perpecahan ini sebenarnya hanya sebua kepentingan personal /pribadi sehingga konflik ini merembet dan semua elite partai terlibat dalam pertikain sehingga melahirkan faksi-faksi dalam struktur partai politik di tingkat lokal, jika dicermati konflik yang terjadi sebenarnya tidak begitu serius dan bisah diselesaiakn melalui mekanisme atau diselesaiakn secara personal maka konflik tidak berdampak pada kelembagaan patai politik.
	Eristyawan F. N. (2013).	Pelebagaan Partai Kebangkitan Bangsa (Studi Kasus Kemerosotan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Jawa Timur).	konsolidasi secara internal partai tidak terbagun dengan baik dan secara pelembagaan partai PKB kehilangan soliditas sehingga berimplikasi pada penurunan suara pada pemilu 2009 di Jawa Timur. Kekalahan ini di akibatkan lemahnya pelembagaan secara internal dan berujung pada perpecahan elite sehingga berpengaruh terhadap elektabilitas partai politik dan berdampak pada kemerosotan suara pada pada pemilu tahun 2009 di provinsi jawa timur.

	Faisol. A. 2014	Konflik internal PDI-Perjuangan Tahun 2005-2009	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan oligarki politik berdampak pada proses konflik internal yang berakibat pada perpecahan menjadi partai baru yang berdampak pada kemerosotan suara hasil pemilu.
	Sari. E. Arsyad. A. & Kambo. G. 2013	Konflik ketiga elit pada pemilihan Walikota & Wakil Walikota Makasar 2013	Menjelaskan bahwa adanya faktor perebutan kekuasaan sesama elite partai. Polarisasi mengarah pada dua ranah arena kekuasaan. Pertama, polarisasi secara internal partai dimana terjadi persaingan antar elit partai untuk menjadi distributor utama alokasi sumber-sumber kekuasaan. Kedua secara eksternal dimana elit antar partai, baik secara individu maupun atas nama institusi kepartaian saling berebut pengaruh untuk menguasai sumber daya kekuasaan yang lebih besar dan lebih luas, dengan menempatkan kandidat mereka pada sumber utama kekuasaan..

Maka berdasarkan pada penelitian terdahulu di atas, dapat diuraikan bahwa fokus penelitian yang akan dilakukan sangatlah berbeda. Walaupun ada kesamaan judul dan teori yang digunakan tetapi penulis lebih mengfokuskan penelitian ini untuk melihat perpecahan dan soliditas elite partai pada kemenangan pilwako di kota ternate tahun 2015 dan faktor-faktor apa yang

menjadi penyebab dalam perpecahan elite partai di tingkat lokal, teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori Pelebagaan Partai sehingga dalam teori ini penulis dapat di gunakan untuk menganalisis permasalahan elite yang ada dalam tubuh Partai Golkar di aras lokal, metode yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis studi kasus kualitatif.

## 2.2 Kerangka Teoritik

Kajian-kajian tentang partai politik merupakan salah satu bidang yang paling penting dan menarik dalam kajian ilmu politik, relevansi kajian ini terkait dengan posisi partai politik sebagai mencari kekuatan untuk merebut kekuasaan, penulis lebih memfokuskan dan melihat perpecahan dan soliditas elite Partai Golkar Kota Ternate dalam kemenangan pilwako Tahun 2015, Maka penulis pada Bab ini yaitu kajian teoritik dan tinjauan pustaka dapat membuat arah penelitian dalam menganalisis, memetakan bagaimana proses internal Partai Golkar Kota Ternate dalam menjaga soliditas pelebagaan dalam pemilihan walikota

dan wakil walikota Ternate Tahun 2015 yang sarat dengan kepentingan-kepentingan aktor politik. Adapun kerangka teoritik yang dipakai oleh penulis yaitu sumber yang di anggap memiliki kompetensi sehingga dapat mendukung teori-teori untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di objek penelitian ini meliputi:

### **2.3 Perpecahan, Soliditas Dan Pelembagaan Partai Politik**

#### **2.3.1 Teori Pelembagaan Partai Politik.**

Kajian institusionalisasi atau dikenal dengan pelembagaan partai politik berhubungan erat dengan kajian politik yang dikembangkan oleh Duverger, Sartoti membuka sebuah pendekatan baru terhadap kajian partai politik yang menekankan pada persoalan internal, sedangkan Huntington adalah seorang pakar politik yang menawarkan beberapa aspek untuk mengkaji pelembagaan partai yang pertama dilihat dari aspek pengaturan dan prosedur (aturan main), memperoleh nilai (atau menjadi sebuah nilai), dan mencapai kestabilan (atau dijalankan secara konsisten). (Noor:2015:13).

Huntington (1968) menawarkan beberapa poin penting untuk melihat atau mengukur keberadaan pelebagaan partai politik yaitu, kemampuan untuk beradaptasi, kompleksitas, otonom, dan koherensi. Yang dimaksud dengan (Adaptasi) adalah seberapa jauh kemampuan partai untuk bertahan dalam sebuah sistem politik dalam konteks hubungan kekuasaan, (kompleksitas) dia berasumsi bahwa terdapat hubungan antara sejumlah ragam subunit dan kemampuan partai politik untuk mempertahankan loyalitas anggotanya, dan keadaan ini secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap penciptaan stabilitas internal didalam partai politik.

Otonomi lebih menekankan pada aspek tingkat perbedaan dengan kelompok-kelompok yang lain, hal ini berarti bahwa partai politik yang terlembaga harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan indenpendensi maupun secara organisasional maupun prosedural, (Koherensi) diukur berdasarkan dan keberadaan consensus internal, dia berasumsi bahwa kapasitas untuk menciptakan kesatuan, kepercayaan diri, dan disiplin sangatlah penting dalam pelebagaan partai.

Panebianco (1988) mendefenisikan pelebagaan sebagai strategi organisasi untuk menciptakan soliditas atau menjadi solid, menurutnya partai yang terlebaga adalah partai yang dapat meningkatkan otonomi dari intervensi kelompok lain serta mempertahankan interdependesi antara actor-aktor internalnya. Imansyah, T. (2012). Permasalahan partai politik adalah lemahnya kelembagaan partai sehingga dinamika ini berimbas pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, belum lagi kader-kader partai yang terlibat dalam kasus korupsi masih saja dilakukan, sehingga praktek-praktek seperti ini secara tidak langsung melemahkan kelembagaan partai, regulasi kepartaian yang ada belum berpengaruh signifikan dalam penguatan kelembagaan partai, lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini lebih disebabkan oleh sistem internal partai yang belum modern.

Romli, L. (2016). Partai politik di era reformasi melahirkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, adanya persoalan yang paling mendasar yang membawa partai politik pada ruang lingkup perpecahan sehingga secara kelambagaan

tidak berfungsi dengan baik ada tiga masalah yang harus di pecahkan yaitu, Ideologi dan platform, kohesifitas dan pengelolaan konflik, rekrutmen politik dan pembentukan kader. Efriza (2012:241). Pelembagaan partai politik sangat di pengaruhi oleh sifat dari peraturan partai, dalam pengerian ini bahwa sebagai lembaga demokrasi yang bentuk, operasi dan ekstensinya di atur dalam undang-undang. Kemampuan suatau partai politik merebut dan mempertahankan dukungannya disuatu pihak dan mengkonsolidasikan diri pada pihak lain antara lain, ditentukan oleh tingkat kelembagaan atau isntitusionalisasi partai itu sendiri. (Haris:2015:72).

Kajian tentang pelembagaan partai adalah sebuah kajian yang dilakukan oleh Randall dan Svasand. Mereka berpendapat bahwa pelembagaan seharusnya di pahami sebagai proses dimana partai menjadi mapan dalam pola perilaku, didasarkan dari pemahaman ini keduanya telah meletakkan empat unsur atau demensi untuk mengetahui pelembagaan partai yaitu, kesisteman, influsi nilai, otonomi, dalam pengambilan keputusan, dan reifikasi. (Randall dan Svasand:2002:12-13).

Tabel. 2.2 Dimensi Pelembagaan Partai

Internal		Eksternal
Struktur	Systemness(Kesisteman)	Otonomi dalam Pengambilan Keputusan
Sikap	Infusi Nilai	Reifikasi

Sumber:Randall & Svasand (2002).

Berhubungan dengan kemampuan menciptakan budaya atau sistem nilai yang khas, yang pada akhirnya akan dapat memberikan dampak positif kepada soliditas partai, sementara itu, otonomi keputusan merujuk pada tingkat kemandirian di dalam proses pengambilan keputusan internal, reifikasi merujuk pada keadaan dimana keberadaan partai tertanam dalam pikiran masyarakat. Basedau dan stroh melakukan modifikasi dari teori pelembagaan yang dikembangkan oleh Randall dan Svasand, menurut mereka pelemabagan pada dasarnya merupakan upaya diseputar menghadirkan kestabilan (Stability) dan penyebaran nilai (value infusion) dalam sebuah partai. (Basedau dan Stroh:2008:7).

## **2.4. Perpecahan Dan Soliditas Elite Partai**

### **2.4.1. Perpecahan Elite.**

Beberapa kalangan dalam dunia akademis telah membahas fenomena perpecahan dan soliditas partai politik secara mendalam. Masalah perpecahan dan soliditas partai politik telah dibahas dari berbagai sudut pandang. Yang di maksud dengan perpecahan adalah sebuah internal/institusi sebuah partai terpeca atau terbagi beberapa faksi yang kemudian saling mengklaim sebagai pihak yang paling benar atau sah. ( Lewis Fickett ) mengemukakan bahwa perpecahan dalam partai politik adalah persoalan pemahaman ideology sehingga melahirkan konflik secara personal diantara elite partai.

Fickett memperlihatkan bahwa perpecahan akan tetap saja menjadi sumber masalah yang tidak terselesaikan jika perbedaan paham ideology yang dilakukan oleh elite partai maka perpecahan dalam tubuh suatu partai politik terus terjadi. Dilain pihak (Martin Bull) meyakini bahwa perselisihan tentang orientasi dan strategi partai untuk mencapai tujuan adalah faktor-faktor yang patut dipertimbangkan manakalah membahas latar

belakang perpecahan partai. Dalam pandangan ini bahwa dalam suatu institusi partai terdapat kelemahan di antaranya lemahnya mekanisme disiplin dan digunakannya model rekrutmen partai berbasis massa lebih cenderung mengurangi disiplin kader dan pada akhirnya memberikan peluang munculnya konflik internal.(Noor :2015:19-21).

Kamarudin, (2009) Persoalan konflik internal partai menunjukkan adanya faktor pragmatisme (perilaku mementingkan diri) sendiri diantara anggota-anggota partai, seperti salah satu kasus yang terjadi dalam tubuh partai PKB dalam konflik PKB adanya faktor kepentingan yang begitu kuat sehingga antara santri dan kiai dalam tataran ini akhirnya menghancurkan spirit kebersamaan, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu sehingga berujung pada perpecahan elite dalam tubuh partai di antaranya, perbedaan pemahaman ideologi partai, lemahnya menegakan disiplin partai, kehadiran konflik personal antara elite , perselisihan terkait tujuan dan strategi partai dalam mencapai tujuan, lemahnya internal partai untuk mengkonstruksi sistem internal yang adil, dan tidak ada kemampuan internal untuk

menyelesaikan konflik secara independen, faktor-faktor ini yang menjadi penyebab utama untuk melahirkan konflik dan perpecahan dalam tubuh partai politik. (Noor:2015:24).

#### 2.4.2. Soliditas Elite

Istilah soliditas dalam konteks ilmu politik telah dikembangkan beberapa pengertian. Sejumlah akademisi mengemukakan pandangan bagai mana memelihara soliditas, koherensi partai, dan pengurangan ketegangan dalam istitusi partai politik menjadi sangat penting sebab didalam tubuh partai politik terdapat subsistem, dalam konteks memelihara soliditas partai, seperti apa yang dikemukakan oleh Parson sebagai “*integrasi*” tujuan dari pandangan ini adalah demi menjaga soliditas di antara unit-unit untuk sebuah kepentingan agar dapat berfungsi secara efektif. (Noor:2015:25).

Sedangkan menurut (Mahendra) secara umum terdapat dua faktor yang menjelaskan mengapa partai itu bersifat kohesi, pertama adalah faktor internal yang terletak dalam partai itu sendiri, kedua faktor eksternal seperti situasi sosio-kultural dan sistem politik tempat partai itu eksis, dari penjelasan di atas dapat

diperlihatkan bahwa partai yang menjadikan ideology bukan untuk hal-hal yang bersifat pragmatis, maka barang tentu cenderung mampu untuk menjaga soliditas internal, dan untuk menjaga soliditas, partai harus lebih memperketat dalam fungsi partai dalam hal proses rekrutmen yang harus lebih diperketat dengan penerimaan anggota yang terbatas, maka akan lebih solid dari pada partai yang terbuka.

(Alan Ware) menjelaskan bahwa partai politik bisah saja menjaga keutuhan kelembagaan atau soliditas internal apabila partai tersebut adalah partai kader dibandingkan partai massa, dalam artian bahwa partai kader lebih melahirkan kader-kader yang lebih militansi dan solid sesama kader partai, disamping itu (Ozbudun:1997) mengemukakan hal yang berbeda dan lebih cenderung mengatakan bahwa partai massa yang lebih efektif untuk mendukung dan menjaga soliditas kader partai karena dalam pandangan ini partai massa lebih independen dan mandiri ketika partai dalam keadaan apa pun sehingga mengurangi *patron-client* di internal partai.

Dilain pihak (Brass:1965) berpendapat bahwa untuk menjaga soliditas partai, pimpinan adalah sala satu unsur yang sangat strategis, apabilah terjadi kesalahpahaman antara kelompok maka posisi pimpinan memiliki kemampuan untuk memediasi permasalahan yang terjadi untuk menyelesaikan konflik dengan tepat agar loyalitas kader tetap terjaga, sedangkan menurut (Prasad:1969) ideology sejatinya memaikan peran yang sangat strategis demi menjaga soliditas, ketika persoalan yang terjadi dalam internal, akan tetapi pimpinan partai lebih di tentukan, dalam arti bahwa pimpinan partai lebih berperan dan mejaga soliditas partai ketimbang ideology, dari berbagai kajian pimpinan sebgai unsur yang menentikan dalam hal membangun soliditas partai.

(Myron Weiner:1957) juga meyakini bahwa posisi pimpinan sangat berperan terhadap soliditas partai khususnya untuk menjaga kompromi diantara faksi-faksi yang berbeda pandangan, di samping itu “Weiner” juga melihat bahwa ada faktor lain yang berperan penting untuk mempertahankan soliditas partai maka

yang diperlukan adalah sikap toleransi terhadap keperawatan faksi-faksi lain dan adanya konsensus atau kesamaan idealisme.

Kajian Ozbudunn dan Were yang memberikan hasil kontradiktif dari hubungan antara partai kader dan soliditas memperstasikan keadaan ini. Selain itu, posisi pemimpin juga masi diperdepatkan, bagi sebgaian kalangan, pemimpin di yakini merupakan variabel atau unsur pendukung bagi terciptanya soliditas, tetapi bagi pihak yang lain, variabel ini justru memiliki potensi membahayakan soliditas partai politik, terutama terkait dengan adanya ambisi pribadi dan konflik kepentingan antara elite.(Hungtington:1965) kemudian membagi atau menawarkan sejumlah kriteria untuk mengukur keberadaan pelebagaan kemampuan keberadaan pelebagaan partai politik maka yang harus dilakukan oleh internal partai adalah kemampuan adaptasi, kompleksitas otonom, dan koherensi.( Noor:2015:31).

## **2.5. Pengertian Partai Politik**

### **2.5.I. Partai Politik**

Sejarah Kehidupan dan pertumbuhan partai politik mulain dikenal dalam bentuk yang moderen di Eropa dan Amerika Serikat sekitar Abad ke-19 bersamaan mulain dikenal sistem pemilihan dan parlementaria, sepanjang perkembangan dan kemajuan sistem pemilihan dan parlementaria ini, maka berkembang pula sistem kepartain politik. Istilah partai yang melekat pada partai politik digunakan untuk setiap bentuk kelompok organisasi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik baik melalui pemilihan demokratis atau revolusi. ( Thoha : 2015 : 16 ).

Sejarah munculnya partai politik di Negara yang satu dengan Negara yang lain memang tidak selalu sama, tetapi ada satu benang merah yang mempertemukannya, yaitu bahwa kemunculan partai-partai itu berbanding lurus dengan tumbuhnya proses demokratisasi (Scerrow) mengatakan bahwa khususnya yang berkaitan dengan kesamaan hak antara warga Negara. Sebagai mana di gariskan oleh Evereth Call Ladd 1970, partai politik merupakan *children of egalitarianism*, karena itu, partai

politik satu pilar dari demokrasi yang harus ada dalam suatu Negara moderen.( Marijan:2004:59 ).

(Budiarjo: 2008: 403) Mendefinisikan Parai politik berangkat suatu Negara demokrasi membentuk wada organisasi politik mereka agara dapat menyatukan orang-orang yang mempunyai orentasi mereka dapat terkonsolidasikan. Dapat membuat pengaru mereka bisah terbuka lebar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan, Carl J. Friedrich mendefinisakan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secarah stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi peminpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan dalam bersifat idil. Signum Neuman mengemukakan bahwa organisasi partai politik adalah bagian dari perkumpulan aktor politik yang berusaha untuk memperoleh kekuasaan dalam ruang lingkup pemerintahan serta menggalang dukungan rakyat sebagai kekuatan basis dalam konteks persaingan dengan satu kelompok atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Sementara itu, William Crotty dan Ricard S Kartz, mendefinisikan partai politik sebagai kelompok otonom warga Negara yang mempunyai tujuan ikut pencalonan dalam pemilu dan bersaing dalam pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan control atau mendapatkan kekuasaan atas pemerintahan melalui kekuasaan jabatan-jabatan publik dan organisasi pemerintahan. Partai politik alasan dasarnya dengan demikian merupakan sarana yang diperlukan untuk memenangi pemilu dan peminpin pemerintahan. (Qodir : 2016 : 15).

(Labolo dan Tegu :2017:181) bawhwa partai politik seyoginya merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Namun saat ini kita rasakan partai politik telah mulai kehilangan arah dan tujuannya. Memang tidak dapat dipungkiri tujuan sederhana dari setiap partai politik adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan seperti yang dikatakana oleh Carl J. Friedrich ataupun pendapat dari La Palobara dan Anderson. Pada intinya mereka mengtakan bahwa organisasi partai politik merupakan sarana untuk menempatkan wakil-wakilnya di Pemerintahan melalui mekanisme pemilu.

Namun realitas yang terjadi, adalah terkadang partai politik lupa akan fungsinya karena terlalu asik dengan tujuan pragmatismenya tersebut.

Surbakti (1992:116) mengemukakan partai politik adalah tempat perkumpulan individu-individu atau kelompok orang yang terorganisir secara baik dan memiliki persamaan ideologi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum dengan tujuan melaksanakan kebijakan yang sudah mereka tetapkan. Kebijakan yang dirumuskan adalah bagian dari kepentingan umum, maka partai politik dalam negara moderen memiliki peran yang sangat signifikan untuk mendorong percepatan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Menurut Dahl ( 1972 ) bahwa partai politik sebagai bagian penting masyarakat politik menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif ketika wakil-wakilnya di parlemen menyelenggarakan kontrol efektif terhadap jalannya kekuasaan. Dalam Pandangan Dahl Tersebut partai politik menjadi salah satu lembaga perwakilan dari lembaga pengontrol maupun

peyimbang, artinya dengan lahirnya partai politik, maka bangsa ini akan menjalankan sistem demokrasi kepartaian dan saling memberikan masukan demi berjalannya pemerintahan atau kekuasaan dengan baik, serta bentuk aspirasi dan mengambil keputusan sesuai dengan harapan masyarakat setempat, dari semua partai politik memiliki visi memajukan dalam mengsejahterakan rakyat Indonesia dari sabang sampai mareuke dengan ideologi dan platform partainya masing-masing.(Muliansyah: 2015 : 126-127).

Sementara itu Soltau menjelskan bahwa Partai Politik sebagai yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, dan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakn umum yang mereka buat.(Surbakti :2010 : 148). Partai politik adalah salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam menopang sistem demokrasi di bangsa ini. Partai politik juga memiliki peran sentral untuk menjaga persamaan dan keseimbangan serta menjaga stabilitas politik, dan menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik. Sistem demokrasi secara umum dan

persaingan politik pada khususnya, tidak dapat dilepaskan dari analisis atas partai politik itu sendiri.

### 2.5.2. Fungsi Partai Politik

Kehadiran Partai politik bukan hanya memperbutkan kekuasaan tetapi di samping itu partai politik memiliki peran penting yang di lakukan yaitu fungsi partai politik yaitu:

#### 1. Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah salah satu instrument partai politik untuk menyalurkan berbagai bentuk aspirasi masyarakat ditengah keberagaman pendapat masyarakat modern yang terus berkembang. aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang apabila tidak rampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang sama, proses tersebut dinamakan. Setelah penggabungan pendapat dan aspirasi tersebut diolah dan dirumuskan sehingga perbedaan pendapat dalam masyarakat dapat berkurang. Dan apabila peran komunikasi politik ini tidak dijalankan dengan baik maka akan melahirkan kegaduhan di tenga-tenga masyarakat.

Dalam aspek lain, partai politik berfungsi untuk menyalurkan dan memulihkan terkait dengan langkah-langkah pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Maka untuk menjaga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat partai politik harus menjalankan komunikasi politik dengan baik, Peran partai sebagai salah satu instrument penting, karena dilain pihak pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah perlu dijelaskan kepada seluruh masyarakat.

## 2. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan tindakan seseorang atau kelompok untuk membangun hubungan interaksi dengan masyarakat untuk mentransformasi dan memberikan informasi terkait dengan situasi politik. Langkah ini merupakan instrumen untuk membentuk basis politik di tengah-tengah masyarakat, maka fungsi sosialisasi politik harus dilaksanakan dengan tujuan untuk menarik simpati publik untuk mengetahui tujuan partai politik yang sebenarnya.

### 3. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan salah satu instrumen penting untuk menyeleksi dan melahirkan tipe kepemimpinan internal partai maupun nasional karena tujuan dari berdirinya partai politik adalah merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum, maka partai politik membutuhkan kader-kader yang memiliki potensi untuk dapat memajukan partainya. Rekrutmen politik dapat menjamin melahirkan kader-kader atau calon-calon yang berintegritas dan bisah membawah cita-cita internal partai dan nasional, maka fungsi rekrutmen politik sangatlah penting untuk di jalankan dengan baik oleh partai politik karena dengan fungsi ini partai politik dapat menemukan sosok kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan publik.

#### **2.6. Perpecahan Partai Golkar**

(Noor :2015: 39-41 ) Perpecahan partai politik tanga melanda partai Golkar yang menyebabkan kemudian hadirnya dua kepengurusan dalam tubu partai itu. Jika di lihat dari sisi sejarah perpecahan itu sendiri bukan sesuatu hal yang baru bahkan sebetulnya telah melanda banyak partai sejak awal

reformasi. Namun dalam beberapa hal, penyebab perpecahan klasik, karena melibatkan beberapa factor yang hampir sama. ada tiga faktor penyebab perpecahan dalam tubu partai politik yaitu:

1. Pemicu Internal

persoalan pertama yang kerap menjadi pemicu dan alasan di balik munculnya faksionalisasi adalah penafsiran akan aturan main yang tidak seragam. Seperti yang terjadi dalam tubu Partai Golkar saat ini, dimana proses pelaksanaan waktu munas menjadi sala satu inti persoalan disitu kemudian merambat pada kecurigaan atas motif dari maneuver-mauver tersebut.

2. Soliditas Semu

Hal yang menarik adalah mengapa manakalah konflik dirasa semakin tak terjembatani sebua faksi dapat membentuk kepengurusan dengan demikian cepat. Setiap pihak yang bertikai baik di Golkar mengaklaim memiiki kepengurusan yang lengkap dan sah hingga ke daerah-daerah. Penyebab mendasar adalah karena adanya Soliditas semu dipartai-partai tersebut, yang kemudian memungkinkan kader-kader atau simpatisan muda sekali di rekrut untuk mendukung kelompok-kelompok tertentu

dengan iming-iming atau janji pragmatis sebagai kompensasinya.

### 3. Peran Eksternal

Dalam beberapa kasus perpecahan partai juga semakin kompleks dengan adanya intervensi pihak luar, baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dalam kasus Golkar turut dimerikan dengan sikap intervisionis pemerintah. Sikap pemerintah itu menyebabkan ada pihak-pihak yang merasa telah mendapat angin dan sah untuk eksis. Namun demikian, akar persoalan jelas bukanlah ada pada pihak eksternal, berbagai intervensi itu hanya memainkan peran sekunder saja, dan jelas tidak akan muncul jika partai-partai yang bertikai itu dapat sejak dini meredam dan menyelesaikan konflik secara mandiri dengan elegan. ( Noor:2015: 39-52 )

Perpecahan Partai Golkar ditingkat DPP adalah sebuah permasalahan yang cukup serius sebab dinamika perpecahan berdampak ketingkat kepengurusan DPD seluru Indonesia, sehingga melahirkan faksionalisme dalam internal Partai Golkar, salah satu daerah yang kena dampaknya adalah DPD I Golkar

Maluku Utara seharusnya elite partai di tingkat lokal lebih mengedepankan mekanisme dalam proses penyelesaian masalah yang melanda internal partai di tingkat DPP, tetapi dinamika yang terjadi di Maluku Utara selama permasalahan berjalan sudah melahirkan konflik diantara elite yang ada di Maluku Utara, saling mengklaim antara sesama elite sehingga perpecahan ini berujung pada pemecatan sejumlah kader yang dianggap aspirasi yang disuarakan telah melanggar intruksi partai pada hal jika dilihat, perhelatan yang terjadi tingkat pusat belum ada titik penyelesaian, maka barang tentu perpecahan ini akan berdampak pada soliditas partai ketika menghadapi Pilkada serentak 2015 di Provinsi Maluku Utara.

Beberapa kalangan dalam dunia akademisi telah membahas fenomena fragmentasi dan soliditas partai politik secara mendalam. Masalah perpecahan atau fragmentasi, yang dimaksud adalah sebuah situasi di mana sebuah partai politik telah dikaji dari berbagai sudut pandang, yang dimaksud dengan fragmentasi adalah sebuah situasi dimana sebuah partai terpecah menjadi sejumlah kelompok atau faksi yang saling mengklaim sebagai

pihak yang paling autentik atau sah dan oleh karenanya berhak untuk atau memanfaatkan seluruh asset partai dan berhak untuk menyatakan sebagai perwakilan sesungguhnya atas aspirasi dan kepentingan partai ( Noor:2015: 19-20 ).

Akhir-akhir ini, di Indonesia terdapat tren baru dalam pendirian partai politik, yaitu sebagai pecahan atau sempalan karena adanya politisi-politisi yang kecewa di partai sebelumnya. Konflik internal semangat konservatisme, kekecewaan terhadap pemimpin, dan garis kebijakan partai, terhambatnya proses regenerasi kader, dan tertutupnya aspirasi politik merupakan faktor-faktor penyebabnya keluarnya sejumlah politisi dari suatu partai.

Dalam (Firmanzah:2011:64-65) Fenomena perpecahan ini bisa dilihat dengan munculnya Partai Demokrasi Indonesia Pembaharuan ( PDI-P ) dibawa pimpinan Megawati Soekarnoputri yang merasa kecewa terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang waktu itu dipimpin Suryadi. Hal yang sama juga dapat kita lihat dalam partai NKRI pimpinan Sys NS yang berangkat dari ketidakpuasan dan berujung pada konflik dalam

tubuh Partai Demokrat, Sys NS merupakan salah satu pendiri Partai Demokrat sementara itu, Partai Hanura juga tidak terlepas dari sosok Wiranto yang pada tahun 2004 menjadi pemenang konvensi calon yang diajukan Golkar dengan mengalakan calon-calon lainnya seperti Akbar Tanjung dan Prabowo Subianto.

Banyak eks-kader Golkar dalam tubuh partai tersebut memungkinkan ideologi dan kebijakan Partai Hanura tidak berbeda dengan Golkar. Hal yang sama juga terjadi dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ), merupakan fusi dari beberapa partai di tahun 1973. Tetapi menjelang pemilu tahun 1999, salah satu tokonya, Jailani Naro mendirikan partai baru yang hamper mirip dengan PPP, yaitu partai persatuan (PP), PPP mengalami perpecahan lagi ketika Zainudin MZ mendirikan Partai Persatuan Pembangunan Reformasi ( PPP Reformasi ) paada tanggal 20 Januari 2002, yang berikutnya beruba menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR) dideklarasikan pada tanggal 9 april 2003.

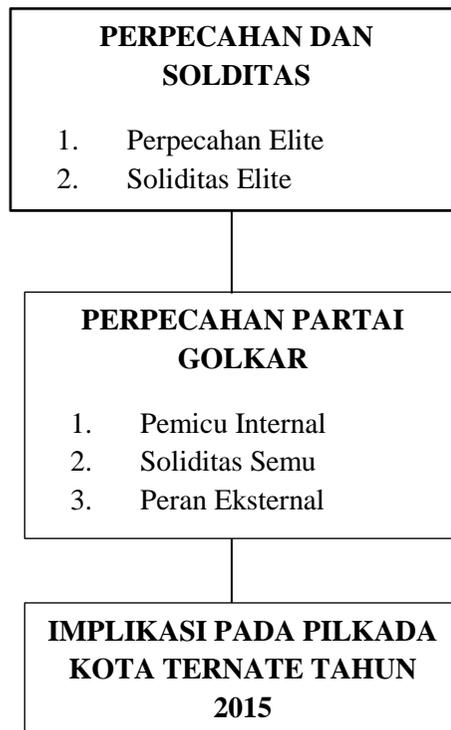
Perjalanan Partai Golkar juga sama dengan apa yang terjadi dengan PPP. Fusi dari beberapa partai di tahun 1973, menjelang pemilu 1999, partai ini menghasilkan dua varian baru, yaitu partai keadilan dan persatuan (PKP) di bawah Edi Sudrajat dan Partai Musyawara kekeluargaan Gotong Royong ( Partai MKGR ) di bawah Hj. Mien Sugandhi, sementara itu menjelang Pemilu 2004, PKP berubah nama menjadi PKP Indonesia dan Partai MKGR berubah nama menjadi Partai Gotong Royong, ini merupakan beberapa contoh bagaimana para elit politik gemar sekali membentuk partai baru ketika kekecewaan muncul dengan partai lama. Alih-alih berusaha menyelesaikan konflik internal, mekanisme yang dipilih justru mempertahankan sisi ketokohan elit politik dengan mendirikan partai politik baru dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa perilaku elit politik masih berkuat dengan individualisme politik bukan pada pemberdayaan sistem internal organisasi partai politik. ( Firmanza:2011:65).

Pengelompokan dalam suatu perkumpulan politik merupakan fenomena biasa dan wajar. Bahkan dalam tradisi organisasi kepartain yang ada di dunia, Sartori bahwa kelompok politik dengan apa yang kemudian dia sebut sebagai faksi ( Faction ) adalah entitas politik yang lebih tua di bandingkan organisasi kepartaian itu sendiri.( Subekti:2014:87 ).

Dalam Interaksi politik para tokoh dalam internal kepartain dapat dikatakan terdapat dua kelompok besar dalam kepemimpinan PSII, pengelompokan ini melibatkan lebih dari seorang pimpinan yang satu sama lain terjalin dalam kerja sama politik. Pandangan dan presepsi politik yang sama telah mendekatkan mereka satu sama lain dan tentu saja berpengaruh terhadap cara pandang mereka atas berbagai persoalan.( Subekti:2014:88).

## 2.7. Kerangka Pikir

Gambar: 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



## 2.8. Defenisi Konseptual

Perpecahan elite adalah pertikaian antara individu atau kelompok kelompok lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan di antaranya, perpecahan elite dalam suatu organisasi sering terjadi tidak simestris dengan pihak yang sadar dan memberikan respon terhadap pertikain tersebut atau

satu pihak mempersepsikan adanya pihak lain telah atau akan menyerang secara negatif sehingga berujung pada perpecahan elite dalam suatu organisasi partai.

## 2.9. Defenisi Operasional

Berdasarkan pendekatan teori instusionalisme partai maka dapat diuraikan indikator defenisi operasional dalam rangka untuk menjelaskan pokok permasalahan yang di rumuskan dalam penelitian ini, yakni sebgai berikut:

Tabel: 2.3 Defenisi Operasional

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
<b>Perpecahan</b>	Perpecahan Elite	Adanya perbedahan pemahaman antara elite partai
<b>Soliditas</b>	Soliditas Elite	Adanya hubungan antara unit-unit untuk sebuah kepentingan agar dapat berfungsi secara efektif
<b>Perpecahan Partai Golkar</b>	Pemicu Internal	Penafsiran akan aturan main yang tidak seragam
	Soliditas Semu	Adanya pemahaman yang tidak teridologi
	Peran Eksternal	Adanya keterlibatan dari pihak lain dalam proses penyelesaian masalah

Sumber: Olah Data (2017).